

ISSN (Print) : 1412-7601  
ISSN (Online) : 2654-8712  
Volume 6, No.1 Maret 2020  
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

**EKONOBIS**

## **Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat**

**Eka Agustiani, Endang Astuti, Siti Sriningsih.**

Universitas Mataram

### ARTICLE INFO

*Keywords :*  
*Implementation of PP 43 of 2014, Village Finance.*

*ABSTRACT : This study aims to analyze the performance of village financial management in Lingsar Subdistrict, West Lombok Regency using the analysis tools for Independent Ratios, Harmony Ratios, Effectiveness Ratios, Efficiency Ratios and Ripley & Franklin Public Policy Implementation Models. From the results of the study, it is expected that policy recommendations regarding village financial management are more transparent and accountable in order to realize independence in financial management. The results showed that the ratios of independence were classified as low, the ratio of harmony was also still below 50 percent, the ratio of effectiveness was classified as effective, while the efficiency ratio was classified as less efficient. The implementation of public policies has fulfilled compliance, the perspective of the smoothness of routines and the perspective of implementation that leads to satisfactory performance*

*Kata Kunci :*  
*Implementasi PP 43 tahun 2014, Keuangan Desa.*

*ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang menggunakan alat analisis Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Model Implementasi Kebijakan Publik Ripley & Franklin. Dari hasil penelitian diharapkan rekomendasi kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel guna mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan rasio-rasio kemandirian yang tergolong rendah, rasio keserasian juga yang masih dibawah 50 persen, rasio efektivitas tergolong efektif, sedangkan rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Pengimplementasian kebijakan public sudah memenuhi kepatuhan, perspektif kelancaran rutinitas dan persepektif pelaksanaan yg mengarah pada kinerja sudah memuaskan*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: [ekaagustiani@unram.ac.id](mailto:ekaagustiani@unram.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pembangunan keuangan desa sangat penting karena untuk mensejahterakan masyarakat desa, perlu upaya dari kepala desa untuk membina dan mengembangkan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga akan tercipta kesejahteraan di masyarakat desa tersebut.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hal kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Hak UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang di dalamnya salah satu pasalnya mengatur juga tentang pengelolaan keuangan

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN

Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Barat yaitu Kecamatan Lingsar dengan 15 Desa yang berada di bawahnya. Dengan potensi SDA yang dimiliki sangat melimpah dan salah satu desa berhasil menjadi juara pada lomba desa terintegrasi tingkat nasional.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, serta implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tahun 2016 dengan menggunakan implementasi kebijakan publik Ripley dan Franklin

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai analisis implementasi PP No. 43 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, jenis penelitiannya adalah deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus

Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, studi kepustakaan,

dan wawancara. Pengolahan data di analisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Pengukuran keuangan desa-desa di Kecamatan Lingsar mempergunakan rasio-rasio keuangan Sedangkan untuk menjawab permasalahan ke dua dipergunakan model implementasi kebijakan publik ( Ripley & Franklin ) dalam ( Dr. Alifin Tahir, M.Si 2014 : 95) yang menilai implementasi kebijakan berdasarkan :

1. Kepatuhan ( Compliance )
2. Perspektif Kelancaran Rutinitas dan Tiadanya Masalah

3. Perspektif Pelaksanaan yang Mengarah Pada Kinerja yang
4. Memuaskan Semua Pihak terutama Kelompok Penerima Manfaat yang Diharapkan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Terkait rincian pendapatan asli desa-desa di Kecamatan Lingsar pada tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 1 APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016**

No	Nama Desa	PADes				JUMLAH
		Hasil Usaha	Hasil Aset Desa	Swadaya,	LPADesa	
1	Batu Kumbang	-	2.300.000	-	-	2.300.000
2	Batu Mekar	50.000.000	-	-	-	50.000.000
3	Bug-Bug	-	-	-	-	-
4	Dasan Geria	-	-	-	-	-
5	Duman	-	-	-	-	-
6	Gegelang	-	5.000.000	-	-	5.000.000
7	Gegerung	-	-	-	-	-
8	Giri Madia	-	-	-	5.000.000	5.000.000
9	Gontoran	18.000.000	-	10.000.000	-	28.000.000
10	Karang Bayan	10.000.000	-	-	-	10.000.000
11	Langko	-	-	-	-	-
12	Lingsar	69.350.000	-	-	-	69.350.000
13	Peteluan Indah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
14	Saribaye	-	-	-	-	-
15	Sigerongan	8.750.000	50.000.000	-	-	58.750.000
RATA-RATA		26.850.000	19.100.000	10.000.000	5.000.000	60.950.000

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

**Pendapatan Transfer Desa**

Pendapatan transfer desa merupakan pendapatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), bagian dari Hasil Pajak Daerah

Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

(BHPRD), Alokasi Dana Desa ( ADD ),

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

**2. Pendapatan Transfer Desa-Desa di Kecamatan Lingsar Tahun 2016 (Rupiah)**

No	Nama Desa	Pendapatan Transfer					Jumlah PTD
		Dana Desa	BPRDesa	ADD	Ban Prov	Ban Kab	
1	Batu Kumbang	734.755.000	49.213.763	773.844.000	-	500.000.000	2.057.812.763
2	Batu Mekar	770.672.000	49.000.000	838.953.000	-	-	1.658.625.000
3	Bug-Bug	666.419.000	47.000.000	656.287.000	-	-	1.369.706.000
4	Dasan Geria	690.756.000	30.000.000	610.385.000	-	-	1.331.141.000
5	Duman	687.130.000	47.000.000	642.308.000	-	-	1.376.438.000
6	Gegelang	647.446.000	41.791.468	692.625.000	-	-	1.381.862.468
7	Gegerung	685.865.000	38.469.105	712.497.000	-	-	1.436.831.105
8	Giri Madia	686.734.000	41.814.000	662.678.000	-	-	1.391.226.000
9	Gontoran	641.384.000	40.000.000	642.028.000	-	-	1.323.412.000
10	Karang Bayan	687.864.000	45.000.000	667.388.000	-	-	1.400.252.000
11	Langko	751.029.000	55.000.000	736.940.000	-	-	1.542.969.000
12	Lingsar	692.663.000	49.500.000	720.410.000	-	-	1.462.573.000
13	Peteluan Indah	679.769.000	31.508.600	694.099.000	-	-	1.405.376.600
14	Saribaye	648.482.000	51.000.000	642.473.000	-	-	1.341.955.000
15	Sigerongan	727.587.000	40.000.000	755.550.000	-	-	1.523.137.000
	Rata-rata	693.237.000	43.753.129	696.564.333	-	500.000.000	1.466.887.796

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

**Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah**

Lain-lain pendapatan desa yang sah merupakan pendapatan yang bersumber dari Hibah ataupun sumbangan lainnya yang berasal dari pihak ke 3. Dari limabelas desa ada dua desa yang memperoleh dana lain-lain yaitu Desa Lingsar sebesar Rp.15.000.000 yang berasal dari bantuan PDAM dan Desa Sigerongan sebesar Rp. 3.113.000 yang berasal dari hibah dan sumbangan pihak ke 3 yang tidak mengikat.

**Anggaran Belanja Desa**

ABD merupakan pengeluaran pemerintah desa yang digunakan dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan desa. Dalam hal ini belanja desa di golongan dalam lima kelompok yaitu : kelompok penyelenggaraan pemerintah desa, kelompok pelaksanaan pembangunan desa, kelompok pembinaan kemasyarakatan, kelompok pemberdayaan masyarakat dan kelompok

tak terduga. Rincian anggaran kinerja desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2 Anggaran Belanja Desa-Desa di Kecamatan Lingsar Tahun 2016 (Rupiah).**

No	Nama Desa	Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Kelembagaan	Bidang Tak Terduga	Jumlah
1	Batu Kumbang	597.716.660	1.110.213.298	153.151.600	167.124.340	11.300.000	2.039.505.898
2	Batu Mekar	640.734.375	734.708.750	153.776.250	175.405.625	4.000.000	1.708.625.000
3	Bug-Bug	513.639.750	588.973.580	110.813.540	101.559.130	-	1.314.986.000
4	Dasan Geria	492.522.170	572.390.630	133.144.100	123.114.100	10.000.000	1.331.171.000
5	Duman	529.928.630	578.103.960	123.879.420	144.525.990	3.730.370	1.380.168.370
6	Gegelang	541.706.490	591.122.491	149.268.802	112.599.996	3.000.000	1.397.697.779
7	Gegerung	543.235.414	614.243.435	128.562.579	149.989.678	5.571.565	1.441.602.671
8	Giri Madia	568.778.000	597.119.930	124.978.590	97.029.070	8.320.410	1.396.226.000
9	Gontoran	506.779.500	584.927.500	109.880.500	132.248.200	7.576.300	1.341.412.000
10	Karang Bayan	520.844.500	606.408.360	126.922.680	143.076.460	5.000.000	1.402.252.000
11	Langko	583.772.750	661.597.020	138.124.260	159.474.970	-	1.542.969.000
12	Lingsar	589.432.375	654.833.625	149.874.575	146.332.425	2.450.000	1.542.923.000
13	Peteluan Indah	532.102.950	601.149.523	130.060.204	147.826.932	-	1.411.139.609
14	Saribaye	504.057.000	517.989.000	164.293.000	150.996.000	-	1.337.335.000
15	Sigerongan	566.405.000	694.711.200	200.780.800	83.103.000	-	1.545.000.000
	Rata-rata	548.777.038	647.232.820	139.834.060	135.627.061	6.094.865	1.475.534.222

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

Dari tabel tersebut diketahui jumlah dengan jumlah biaya tersendah adalah belanja desa di Kecamatan Lingsar rata-rata berjumlah 1.475.534.222. jumlah Desa Bug-Bug.

belanja desa terbesar adalah Desa Batu Rasio Kemandirian Rasio kemandirian Kecamatan Lingsar Kumbang sebesar 2.039.505.898 dan desa dapat dilihat dari tabel 3 berikut

**Tabel 3 Kemandirian Keuangan Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Tahun 2016**

RASIO KEMANDIRIAN					
NO	NAMA DESA	PADes	PENDAPATAN TRANSFER	HASIL RASIO KEMANDIRIAN	
1	Batu Kumbang	2.300.000	2.039.505.898	0,11%	Rendah sekali
2	Batu Mekar	50.000.000	1.708.625.000	2,93%	Rendah sekali
3	Bug-Bug	-	1.314.986.000	0,00%	Rendah sekali
4	Dasan Geria	-	1.331.171.000	0,00%	Rendah sekali
5	Duman	-	1.380.168.370	0,00%	Rendah sekali
6	Gegelang	5.000.000	1.397.697.779	0,36%	Rendah sekali
7	Gegerung	-	1.441.602.671	0,00%	Rendah sekali
8	Giri Madia	5.000.000	1.396.226.000	0,36%	Rendah sekali
9	Gontoran	28.000.000	1.341.412.000	2,09%	Rendah sekali
10	Karang Bayan	10.000.000	1.402.252.000	0,71%	Rendah sekali
11	Langko	-	1.542.969.000	0,00%	Rendah sekali
12	Lingsar	69.350.000	1.542.923.000	4,49%	Rendah sekali

13	Peteluan Indah	5.000.000	1.411.139.609	0,35%	Rendah sekali
14	Saribaye	-	1.337.335.000	0,00%	Rendah sekali
15	Sigerongan	58.750.000	1.545.000.000	3,80%	Rendah sekali
Rata-rata		25.933.333	1.475.534.222	1,01%	Rendah sekali

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian desa-desa di Kecamatan Lingsar berada pada tingkat rendah sekali dengan rata-rata tingkat kemandirian 1,01 persen, hal tersebut mencerminkan

tingkat ketergantungan desa-desa di Kecamatan Lingsar terhadap transfer masih sangat tinggi sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa.

#### Rasio Keserasian

**Tabel 4. Rasio Keserasian Keuangan Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Tahun 2016**

RASIO KESERASIAN						
No	Nama Desa	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan	Total Apbdes	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan
1	Batu Kumbang	929.292.600	1.110.213.298	2.060.112.763	45%	54%
2	Batu Mekar	973.916.250	734.708.750	1.708.625.000	57%	43%
3	Bug-Bug	726.012.420	588.973.580	1.369.706.000	53%	43%
4	Dasan Geria	758.780.370	572.390.630	1.331.141.000	57%	43%
5	Duman	802.064.410	578.103.960	1.376.438.000	58%	42%
6	Gegelang	806.575.288	591.122.491	1.386.862.468	58%	43%
7	Gegerung	827.359.236	614.243.435	1.436.831.105	58%	43%
8	Giri Madia	799.106.070	597.119.930	1.396.226.000	57%	43%
9	Gontoran	756.484.500	584.927.500	1.351.412.000	56%	43%
10	Karang Bayan	795.843.640	606.408.360	1.410.252.000	56%	43%
11	Langko	881.371.980	661.597.020	1.542.969.000	57%	43%
12	Lingsar	888.089.375	654.833.625	1.546.923.000	57%	42%
13	Peteluan Indah	809.990.086	601.149.523	1.410.376.600	57%	43%
14	Saribaye	819.346.000	517.989.000	1.341.955.000	61%	39%
15	Sigerongan	850.288.800	694.711.200	1.585.000.000	54%	44%

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian diatas, maka dapat dilihat bahwa pengalokasian dana baik belanja rutin maupun belanja pembangunan sangat bervariasi. Dari hasil perhitungan rasio keserasian diatas dapat dilihat

bahwa hanya ada satu desa yang lebih mengoptimalkan dananya untuk belanja pembangunan yaitu Desa Batu Kumbang sebesar 54% dari total APBDes, Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa-

desa pada Kecamatan Lingsar seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan, pembangunan kios, pembuatan talut, dan lain sebagainya. . Sedangkan desa-desa lainnya masih lebih mengutamakan belanja rutin. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya beberapa program,

sehingga pengalokasian dana yang seharusnya digunakan untuk belanja pembangunan dialihkan kepada pengalokasian belanja rutin pemerintah desa.

### Rasio Efektifitas

**Tabel 5 Perhitungan Rasio Efektifitas PADes Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar**

No	Nama Desa	Realisasi Pades	Target Pades	Hasil	Kriteria
1	Batu Kumbang	2.300.000	2.300.000	100%	Efektif
2	Batu Mekar	50.000.000	50.000.000	100%	Efektif
3	Bug-Bug	0	0	-	Tidak Efektif
4	Dasan Geria	0	0	-	Tidak Efektif
5	Duman	0	0	-	Tidak Efektif
6	Gegelang	5.000.000	5.000.000	100%	Efektif
7	Gegerung	0	0	-	Tidak Efektif
8	Giri Madia	5.000.000	5.000.000	100%	Efektif
9	Gontoran	28.000.000	28.000.000	100%	Efektif
10	Karang Bayan	10.000.000	10.000.000	100%	Efektif
11	Langko	0	0	-	Tidak Efektif
12	Lingsar	69.350.000	69.350.000	100%	Efektif
13	Peteluan Indah	5.000.000	5.000.000	100%	Efektif
14	Saribaye	0	0	-	Tidak Efektif
15	Sigerongan	58.750.000	58.750.000	100%	Efektif

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas PADes sembilan desa di Kecamatan Lingsar pada tahun 2016 dapat dikatakan efektif karena rata-rata persentase mencapai 100%. Sedangkan 6 lainnya tidak memiliki PADes dan target maka dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini disebabkan karena rendahnya target dan realisasi PADes yang dimiliki oleh desa-desa di Kecamatan Lingsar.

Selain itu kurang beraninya pemerintah desa-desa di Kecamatan Lingsar dalam menargetkan pendapatan asli desanya disebabkan minimnya usaha dan aset desa yang dimiliki.

### Rasio efisiensi

Rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada desa-desa yang berada di Kecamatan Lingsar pada tahun 2016.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini  
keuangan desa-desa di Kecamatan Lingsar

**Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar**

Rasio Efisiensi					
No	Nama Desa	belanja desa	pendapatan desa	hasil	kriteria
1	Batu Kumbang	2.039.505.898	2.060.112.763	99%	Kurang Efisien
2	Batu Mekar	1.708.625.000	1.708.625.000	100%	Kurang Efisien
3	Bug-Bug	1.314.986.000	1.369.706.000	96%	Kurang Efisien
4	Dasan Geria	1.331.171.000	1.331.141.000	100%	Kurang Efisien
5	Duman	1.380.168.370	1.376.438.000	100%	Kurang Efisien
6	Gegelang	1.397.697.779	1.386.862.468	101%	Kurang Efisien
7	Gegerung	1.441.602.671	1.436.831.105	100%	Kurang Efisien
8	Giri Madia	1.396.226.000	1.396.226.000	100%	Kurang Efisien
9	Gontoran	1.341.412.000	1.351.412.000	99%	Kurang Efisien
10	Karang Bayan	1.402.252.000	1.410.252.000	99%	Kurang Efisien
11	Langko	1.542.969.000	1.542.969.000	100%	Kurang Efisien
12	Lingsar	1.542.923.000	1.546.923.000	100%	Kurang Efisien
13	Peteluan Indah	1.411.139.609	1.410.376.600	100%	Kurang Efisien
14	Saribaye	1.337.335.000	1.341.955.000	100%	Kurang Efisien
15	Sigerongan	1.545.000.000	1.585.000.000	97%	Kurang Efisien
<b>Rata-rata</b>		1.475.534.222	1.483.655.329	99%	Kurang Efisien

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa-desa di Kecamatan Lingsar pada tahun 2016 seluruhnya berada pada tingkat kurang efisien.

#### **Implementasi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014**

Dalam mengukur implementasi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 ini digunakan model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yaitu dilihat dari kepatuhan dan proses pelaksanaannya.

#### **Kepatuhan**

Tingkat keberhasilan kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan yang dalam hal ini tingkat kepatuhan yang diukur yaitu kepatuhan implementator terhadap peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2016 terkait pengelolaan keuangan.

Berikut dapat dilihat bagaimana kepatuhan pemerintah desa di Kecamatan Lingsar pada tahun 2016 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangannya.



1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 100 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian paling banyak 30% ( $\leq 30\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan

untuk Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Operasional pemerintah desa, kegiatan operasional Badan Permasyarakatan Desa, dan kegiatan operasional RT dan RW.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dilihat tingkat kepatuhan desa-desa di Kecamatan Lingsar berdasarkan pasal 100 pada tabel 7 dibawah ini.

**Tabel 7. Penerapan Pasal 100 PP No 43 Tahun 2014.**

Penggunaan Anggaran Menurut Pasal 100 Dalam Pp No 43 Tahun 2014							
No	Nama Desa	Jumlah Belanja Dari 4 Bidang Belanja	Jumlah Apbdes	$\geq 70\%$	Jumlah Belanja 4 kelompok Pemdes	Jumlah Belanja Desa	$\leq 30\%$
1	Batu Kumbang	2.028.250.898	2.060.112.763	98,45%	467.537.800	2.039.505.898	22,92%
2	Batu Mekar	1.704.625.000	1.708.625.000	99,76%	512.587.500	1.708.625.000	30%
3	Bug-Bug	1.362.042.200	1.369.706.000	99,44%	428.513.360	1.314.986.000	32,59%
4	Dasan Geria	1.331.141.000	1.331.141.000	100%	269.422.170	1.331.171.000	20,24%
5	Duman	1.132.509.370	1.376.438.000	82,28%	412.931.400	1.380.168.370	29,92%
6	Gegelang	1.394.697.779	1.386.862.468	100,56%	419.519.500	1.397.697.779	30,01%
7	Gegerung	1.436.031.106	1.436.831.105	99,94%	422.998.000	1.441.602.671	29,34%
8	Giri Madia	1.387.905.590	1.396.226.000	99,4%	424.045.300	1.396.226.000	30,37%
9	Gontoran	1.333.835.700	1.351.412.000	98,7%	405.423.600	1.341.412.000	30,22%
10	Karang Bayan	1.397.252.000	1.410.252.000	99,09%	423.075.600	1.402.252.000	30,17%
11	Langko	1.542.969.000	1.542.969.000	100%	459.454.200	1.542.969.000	29,78%
12	Lingsar	1.540.473.000	1.546.923.000	99,58%	469.873.500	1.542.923.000	30,45%
13	Peteluan Indah	1.410.376.000	1.410.376.600	99,99%	418.612.280	1.411.139.609	29,68%
14	Saribaye	1.337.335.000	1.341.955.000	99,65%	459.757.000	1.337.335.000	23,89%
15	Sigerongan	1.545.000.000	1.585.000.000	97,48%	479.500.000	1.545.000.000	30,25%
	Rata-rata	1.458.962910	1.483.655.329	98,29%	431.550.080	1.475.534.222	29,35%

Sumber: APBDes desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa kepatuhan desa-desa di Kecamatan Lingsar terhadap pasal 100 di

dalam PP No 43 Tahun 2014 sudah memenuhi ketentuan baik dalam

penggunaan dana 70% ataupun penggunaan dana 30%.

Dalam penggunaan dana 70% dari APBDes rata-rata desa-desa di Kecamatan Lingsar sudah mampu memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal 100 PP No 43 Tahun 2014 karena penggunaan APBDes yang telah dikelola oleh desa-desa di Kecamatan Lingsar ini sudah melebihi dari 70% yang merupakan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014.

Kemudian untuk penggunaan dana sebesar 30% dari belanja desa sebagaimana tabel 4.8 terlihat bahwa penggunaan dana tersebut rata-rata sebesar 29,35% yang berarti memenuhi ketentuan bahwa penggunaan dana tersebut tidak lebih dari 30%. Tetapi berdasarkan tabel diatas terdapat lima desa yang penggunaan dananya lebih dari 30% yaitu desa Bug-bug dengan persentase 32,59% ,desa Gegelang dengan persentase 30,01% ,desa Giri Madia dengan persentase 30,37% ,desa Gontoran dengan persentase 30,22% ,desa Karang Bayan dengan persentase 30,17% ,desa Lingsar dengan persentase

30,45% dan desa Sigerongan dengan persentase 30,25%. Hal ini terjadi karena kurangnya anggaran belanja yang tersedia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 ayat 2 dan 4 tentang penghasilan pemerintah desa.

Ayat 2 tentang ketentuan penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa:

**Ketentuan ADD Untuk Membiayai Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.**

KETENTUAN ADD	
ADD(JUTAAN RUPIAH)	DIGUNAKAN MAKSIMAL
<500	60%
500-700	50%
700-900	40%
>900	30%

Sumber: PP No 43 Tahun 2014

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penggunaan ADD pada desa-desa di Kecamatan Lingsar tahun 2016 dalam membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 8. Rincian Penggunaan Add untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

No	Nama Desa	Jumlah Add	Maksimal Penggunaan	Penghasilan Perangkat Desa	Persentase Penggunaan
1	Batu Kumbang	773.844.000	40%	285.350.000	60%
2	Batu Mekar	838.953.000	40%	425.100.000	60%
3	Bug-Bug	656.287.000	50%	215.150.000	60%
4	Dasan Geria	610.385.000	50%	250.900.000	60%
5	Duman	642.308.000	50%	241.150.000	60%
6	Gegelang	692.625.000	50%	251.550.000	60%
7	Gegerung	712.497.000	40%	335.400.000	60%
8	Giri Madia	662.678.000	50%	215.150.000	60%
9	Gontoran	642.028.000	50%	250.250.000	60%
10	Karang Bayan	667.388.000	50%	215.150.000	60%
11	Langko	736.940.000	40%	241.150.000	60%
12	Lingsar	720.410.000	40%	254.150.000	60%
13	Peteluan Indah	694.099.000	50%	319.800.000	60%
14	Saribaye	642.473.000	50%	239.850.000	60%
15	Sigerongan	755.550.000	40%	364.000.000	60%
	rata-rata	696.564.333	46%	108.940.000	60%

sumber: APBDes Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Tahun 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa-desa di kecamatan Lingsar ini tergolong belum patuh terhadap pasal 81 ayat 2 yang terdapat dalam pp no 43 tahun 2014. hal ini karena penggunaan dana add yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan sebagai ayat 4 tentang ketentuan penghasilan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

ketentuan penghasilan	
Sekdes	perangkat lain
70% dari penghasilan kades	50% dari penghasilan kades

sumber: pp no 43 tahun 2014

berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dilihat bagaimana kepatuhan desa-desa di kecamatan Lingsar terhadap peraturan tersebut. berikut dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini:

**Tabel 9 Penghasilan Tetap Perangkat Desa Selain Kades**

No	Nama Desa	Kades	Sekdes		Kepala Seksi		Kepala Urusan		Kepala Dusun	
			Gaji	(%)	Gaji	(%)	Gaji	(%)	Gaji	(%)
1	Batu Kumbang	4.000.000	2.800.000	70%	2.000.000	50%	2.000.000	50%	1.660.000	41,5%
2	Batu Mekar	6.000.000	4.200.000	70%	3.000.000	50%	3.000.000	50%	2.408.000	40,1%
3	Bug-Bug	3.000.000	2.100.000	70%	1.500.000	50%	1.500.000	50%	1.277.000	42,6%
4	Dasan Geria	3.500.000	2.450.000	70%	1.750.000	50%	1.750.000	50%	1.486.000	42,5%
5	Duman	3.300.000	2.310.000	70%	1.650.000	50%	1.650.000	50%	1.528.600	46,3%
6	Gegelang	3.600.000	2.520.000	70%	1.800.000	50%	1.800.000	50%	1.347.500	37,4%
7	Gegerung	4.750.000	3.325.000	70%	2.375.000	50%	2.375.000	50%	1.875.000	39,5%
8	Giri Madia	3.000.000	2.100.000	70%	1.500.000	50%	1.500.000	50%	1.277.000	42,6%
9	Gontoran	3.450.000	2.415.000	70%	1.725.000	50%	1.725.000	50%	1.546.400	44,8%
10	Karang Bayan	3.000.000	2.100.000	70%	1.500.000	50%	1.500.000	50%	1.277.000	42,6%
11	Langko	3.300.000	2.310.000	70%	1.650.000	50%	1.650.000	50%	1.528.600	46,3%
12	Lingsar	3.800.000	2.660.000	70%	1.900.000	50%	1.900.000	50%	1.106.400	29,1%
13	Peteluan Indah	4.550.000	3.185.000	70%	2.275.000	50%	2.275.000	50%	1.755.000	38,6%
14	Saribaye	3.275.000	2.292.500	70%	1.637.500	50%	1.637.500	50%	1.531.600	46,8%
15	Sigerongan	5.500.000	3.850.000	70%	2.750.000	50%	2.750.000	50%	1.483.300	26,7%
	Rata-rata	3.868.300	2.707.800	70%	1.934.200	50%	1.934.200	50%	1.539.160	40,5%

Sumber: APBDes Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan kepala desa di kecamatan Lingsar pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.868.300, dan rata-rata penghasilan sekretaris desa Rp. 2.707.800. Berdasarkan dapat tersebut maka dapat dikatakan semua desa di kecamatan Lingsar mengikuti ketentuan PP No 43 Tahun 2014 pasal 81 ayat 4

dalam mengalokasikan anggaran dana desa.

### **Pelaksanaan**

Kemudian didalam melihat bagaimana pelaksanaan pp no 43 tahun 2014 di

kecamatan Lingsar ini dapat dilihat dari apa yang dicapai, kejelasan tujuan, dan apa saja yang mempengaruhi penerapan kebijakan di kecamatan Lingsar.

Dalam hal ini dapat dilihat dari program-program yang terencana pada desa-desa yang terdapat di kecamatan Lingsar dengan membandingkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) dan Laporan Ralisasi Anggaran Desa (LRA) sekaligus melihat bagaimana tingkat pencapaian dan kendalanya. berikut dapat dilihat pencapaian program yang direncanakan pada desa-desa di kecamatan Lingsar pada tabel 10:

**Tabel 10. Perbandingan Rencana Dan Realisasi Program/Kegiatan**

No	Nama Desa	Program/ Kegiatan Dalam RKPDES	Program/Kegiatan Dalam LRA
1	Batu Kumbang	24	27
2	Batu Mekar	13	14
3	Bug-Bug	15	14
4	Dasan Geria	10	10
5	Duman	7	7
6	Gegelang	4	4
7	Gegerung	25	25
8	Giri Madia	6	6
9	Gontoran	14	14
10	Karang Bayan	6	6
11	Langko	25	25
12	Lingsar	13	13
13	Peteluan Indah	12	12
14	Saribaye	23	23
15	Sigerongan	24	24
Rata-rata		14,7/15	14,9/15

Sumber: Laporan RKP dan IRA desa-desa di kecamatan Lingsar.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa dari rata-rata kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Desa dalam rencana tahunan ternyata semua program/kegiatan dapat terealisasi didalam laporan pertanggungjawaban desa.

Kemudianterrealisasinya program/kegiatan desa tersebut tidak semuanya merupakan bagian rencana kerja pembangunan desa pada tahun 2016, akan tetapi beberapa dari program/kegiatan yang terealisasi tersebut juga merupakan bagian didalam

rencana pembangunan jangka menengah desa yaitu dengan direalisasikannya program/kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Hal tersebut terjadi karena adanya program/kegiatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan atau program/kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh setiap pemerintah desa pada tahun tersebut. Hal inipun diperbolehkan selama masih berpedoman pada rencana pembangunan jangka

menengah desa dan atas hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang disertai dengan laporan atas terlaksananya kegiatan/program tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam permendagri 114 tahun 2014 pasal 49 dan pasal 79 undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terselenggaranya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 ini pada desa-desa di kecamatan Lingsar pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara terhadap 20 orang informan yang terdiri dari 8 kepala desa, 6 sekretaris desa, 1 pendamping kecamatan dan 3 kasubag tata usaha serta 2 kepala badan pengawas desa, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan adalah:

1. faktor pendukung implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 adalah kelengkapan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang pengelolaan keuangan kantor desa, pembinaan sumber daya manusia (sdm) melalui sosialisasi peraturan secara berkelanjutan kepada seluruh

aparatur desa dan terjadinya peningkatan pendapatan desa setiap tahun.

2. faktor penghambat implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, rendahnya swadaya masyarakat, terlambatnya pencairan dana, harga dilapangan yang seringkali melebihi pagu anggaran dan sdm yang masih kurang memahami administrasi keuangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Rasio Kemandirian seluruh desa di Kecamatan Lingsar tergolong rendah sekali. Rata-ratanya 1.01%, Rasio Keserasian seluruh desa di Kecamatan Lingsar bervariasi tetapi dibawah 50%, Rasio Efektifitas seluruh desa di Kecamatan Lingsar tergolong efektif, Rasio Efisiensi rata-rata kurang efisien.

Pengimplementasian PP No. 43 Tahun 2014 dengan perspektif kepatuhan untuk semua desa-desa di Kecamatan Lingsar telah mengimplementasikan

aturan tersebut. Berdasarkan perspektif rutinitas dan tiadanya masalah para implementor dapat megeliminir setiap permasalahan yang ditemui dengan melaksanakan musyawarah mufakat bersama para implementor yang lain. Ketiga perspektif pelaksanaan yang mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan termasuk dalam kategori rendah. Hal

tersebut tercermin dari kinerja keuangan desa-desa di Kecamatan Lingsar.

#### **Saran**

Perlunya digali sumber-sumber asli pendapatan desa tersebut. Seperti mengoptimalkan potensi alamnya untuk ekowisata dan Peningkatan kinerja keuangan sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kemandirian keuangan dan pengelolaan keuangan desa.

---

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

- Abidin, Muhammad Zainul. 2016. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol.6 No.1: 61-76.
- Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011. (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi kebijakan*. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume.1 No.1:1-11.
- Anonymus. Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Tahun 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Mataram 2014. Mataram.
- \_\_\_\_\_ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram 2016. Mataram.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.

\_\_\_\_\_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.

\_\_\_\_\_Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Lombok Barat.

\_\_\_\_\_Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.

\_\_\_\_\_Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

\_\_\_\_\_Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta  
Atmaja, Dinar Aji .2016. *Analiisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Naskah Publikasi.

Aziz. Fathul. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013*. (Skripsi, Universitas Mataram).

Desa Ciburial. 2016. *Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Ciburial*:  
<https://ciburial.desa.id/kinerja-keuangan-pemerintah-desa-ciburial/>, Diakses tanggal 10 November 2016.

Dewanti, Dwi. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng*. Fakultas Ekonomi. Jember.

Diansari, Rani Eka. *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa DiKecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Universitas PGRI Yogyakarta: 504-511.

Faisal, Basri. *Teori Pengeluaran Pemerintah*.<http://:dadgsukdgkugd>, diakses pada tanggal 12 Januari tahun 2008.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

\_\_\_\_\_2007. *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keungan Daerh*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Hendro, Sumarjo. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).



Ilhami, Persada Alief Panugroho. 2016. *Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).

Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.Yogyakarta